

RINGKASAN

Subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, bisnis, atau lembaga untuk meringankan beban finansial, mempromosikan kebaikan sosial, atau kebijakan ekonomi. Salah satu bentuk subsidi yang diberikan pemerintah adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam hal ini melalui PT. Pertamina. Untuk mendapatkan subsidi yang tepat sasaran, Pertamina menggunakan aplikasi MyPertamina. Pengguna mobil berbahan bakar Solar wajib menggunakan barcode yang tertera pada aplikasi MyPertamina dan kendaraan berbahan bakar Pertalite hanya dapat mengisi 10 liter tanpa menggunakan barcode. Berdasarkan uraian tersebut maka, pemerintah seharusnya membuat sanksi untuk menindak para pengguna BBM bersubsidi yang tidak menaati aturan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*), kemudian data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan dan pertanggungjawaban hukum keuangan negara dalam penerapan pembatasan subsidi BBM melalui aplikasi MyPertamina, tujuan dibuatnya kebijakan ini adalah untuk memperbaharui data base pengguna agar subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran. Setiap pembelian BBM harus menggunakan barcode yang terdapat dalam aplikasi MyPertamina. Tanpa menggunakan barcode, masyarakat hanya dapat membeli maksimal 10 liter Pertalite. Pengguna kendaraan diesel wajib menggunakan barcode yang sudah di daftarkan pada aplikasi MyPertamina serta surat rekomendasi dari perangkat daerah setempat. Kebijakan penggunaan aplikasi ini belum efektif untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi karena masih banyak terjadi kecurangan saat pembelian BBM bersubsidi dan belum adanya sanksi yang tegas dari Pertamina untuk konsumen yang melanggar membeli BBM bersubsidi tanpa barcode. Pelanggaran terkait subsidi BBM tanpa menggunakan barcode, maka pihak yang harus bertanggungjawab adalah perorangan sebagai konsumen, SPBU selaku pelaku usaha, dan Pertamina sebagai BUMN. Perorangan yang membeli BBM bersubsidi tanpa menggunakan barcode maka konsumen tersebut tidak boleh mengisi BBM di SPBU hingga dia dapat menunjukkan barcode kendaraannya. SPBU dan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola BBM bersubsidi yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara penyaluran BBM pada tahun berjalan, dan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

SUMMARY

Subsidies are assistance provided by the government to individuals, businesses, or institutions to ease financial burdens, promote social good, or economic policy. One form of subsidy provided by the government is fuel oil (BBM) subsidies, in this case through PT. Pertamina. To get targeted subsidies, Pertamina uses the MyPertamina application. Diesel fueled car users are required to use the barcode listed on the MyPertamina application and Peralite fueled vehicles can only fill 10 liters without using a barcode. Based on this description, the government should create sanctions to take action against subsidized fuel users who do not comply with the rules. The research method used is normative juridical with prescriptive research specifications. The author's data collection methods were field research and library research, then the data collected was analyzed using qualitative analysis methods. Based on the results of policy research and state financial legal accountability in implementing restrictions on fuel subsidies through the MyPertamina application, the aim of making this policy is to update the user data base so that fuel subsidies are more targeted. Every fuel purchase must use the barcode contained in the MyPertamina application. Without using a barcode, people can only buy a maximum of 10 liters of Peralite. Diesel vehicle users are required to use the barcode that has been registered on the MyPertamina application as well as a letter of recommendation from the local regional apparatus. The policy of using this application has not been effective in limiting the purchase of subsidized fuel because there is still a lot of fraud when purchasing subsidized fuel and there are no strict sanctions from Pertamina for consumers who violate buying subsidized fuel without a barcode. Violations related to fuel subsidies without using barcodes, the parties who must be responsible are individuals as consumers, gas stations as business actors, and Pertamina as a BUMN. Individuals who buy subsidized fuel without using a barcode are not permitted to fill up with fuel at gas stations until they can show their vehicle's barcode. Gas stations and business entities appointed by the government to manage subsidized fuel that violate the provisions will be subject to administrative sanctions in the form of a warning, temporary suspension of fuel distribution in the current year, and Termination of Business Relations (PHU).